

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Yang di maksud pertumbuhan adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan Produk Nasional Bruto(*Gross National Product*). Pertumbuhan ekonomi secara umum biasanya diukur dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto dari suatu daerah atau negara yang menjadi objek penelitian. Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting yang harus ada di dalam pembangunan ekonomi, dimana laju pertumbuhan ekonomi diharapkan harus lebih besar dari ada laju pertumbuhan penduduk , dengan demikian peningkatan pendapatan perkapita dapat tercapai. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi dengan sendirinya ataupun campur tangan pemerintah harus dinikmati masyarakat.

Dalam upaya mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi tertinggi, pemerintah daerah sebagai otoritas pembangunan di daerah dituntut untuk menerapkan kebijakan yang dapat menciptakan iklim kondusif bagi kegiatan-kegiatan produktif para pelaku ekonomi. Salah satu kebijakan yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi adalah membangun infrastuktur. Indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah bisa dilihat laju pertumbuhan ekonomi. pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi karena penduduk bertambah terus,

maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahunnya. Hal ini dapat terpenuhi lewat peningkatan output secara agregat baik barang maupun jasa atau Produk Domestik Bruto setiap tahunnya. Jadi, menurut ekonomi makro, pengertian pertumbuhan ekonomi merupakan penambahan PDB yang artinya juga penambahan pendapatan nasional.

Todaro (2000) ,menyatakan meskipun laju pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis dapat memberi jawaban atas berbagai macam persoalan kesejahteraan, namun hal tersebut merupakan unsur penting setiap program pembangunan realitis yang sengaja dirancang untuk mengentaskan kemiskinan. Jika dilihat dari hasil penelitian dan data statistik, akan terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi telah berjalan dengan pesat namun pertumbuhan yang pesat ini telah membawa akibat yang menghawatirkan, yaitu terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan yang buruk.

Indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah bisa dilihat laju pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sukirno, 2008).

Suparno (2014), pengeluaran pemerintah yang terdapat dalam Anggaran pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dapat menggunakan untuk mengelola perekonomian negara. APBN ada perkembangannya telah mengalami banyak perubahan struktur, pengeluaran pemerintah atas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur ada dasarnya merupakan suatu investasi pertumbuhan ekonomi. Efek

pembangunan ada ketiga bidang tersebut tidak dapat berdampak langsung melainkan membutuhkan beberapa periode untuk dapat merasakan dampaknya.

Menurut Todaro (2006), Pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi sebuah Negara. Karena perkembangan dan kemajuan suatu bangsa dapat diukur melalui tingkat dan kualitas pendidikan serta kualitas sumber daya manusiannya. Pendidikan memainkan peran utama dalam membentuk kemampuan sebuah Negara untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut Setiawan (2006), implikasi dan pembangunan dalam pendidikan adalah kehidupan manusia akan semakin berkualitas. Kaitannya dengan perekonomian secara umum (nasional) semakin tinggi kualitas hidup bangsa, semakin tinggi tingkat perekonomian dan kesejahteraan bangsa tersebut. Semakin tinggi atau investasi sumber daya manusia yang kualitas tinggi akan berimplikasi juga terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi nasional.

Pengeluaran kesehatan juga terdiri dari pengeluaran rutin dan pembangunan yang digunakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Pengeluaran dibidang kesehatan akan dibagi ke berbagai subbidang, antara lain obat dan perbekalan kesehatan, pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat, kependudukan dan keluarga berencana kesehatan lainnya.

Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan tentunya membutuhkan modal manusia yang berkualitas sebagai modal dasar pembangunan. Untuk menghasilkan manusia yang berkualitas juga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Pemerintah melakukan pengeluaran atau investasi yang ditujukan untuk pembangunan manusia. Pengeluaran pemerintah merupakan cerminan kebijakan yang diambil oleh

pemerintah. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah tersebut digunakan untuk membiayai sektor publik yang lebih penting dan menjadi prioritas dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tercermin pada indeks pembangunan manusia.

Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan merupakan dua dari beberapa faktor yang memengaruhi pembangunan manusia. Kedua faktor tersebut, merupakan layanan jasa yang normatifnya disediakan oleh pemerintah, bukan bertumpuh pada swasta terlebih dasar. Dalam hal peningkatan pembangunan manusia, pendidikan dan kesehatan yang baik bagi setia manusia bisa terwujud melalui alokasi pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan. Dengan meningkatnya alokasi pengeluaran pemerintah disektor tersebut maka akan meningkatkan produktivitas penduduk sehingga bisa meningkatkan pembangunan manusia. Untuk selanjutnya pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan dapat disebut sebagai investasi publik.

Pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah merupakan salah satu instrument strategis dalam perekonomian. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terdapat unsur pendapatan dan belanja. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Pada dasarnya alokasi belanja modal digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana daerah, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan ataupun untuk fasilitas publik. modal memiliki peran penting dalam meningkatkan infrastruktur publik, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi nilai rasio belanja modal

maka semakin tinggi pula diharapkan dampaknya terhadap perkembangan perekonomian di daerah tersebut.

Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa secara normatif semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan. Anasmen (2009), menunjukkan bahwa belanja modal tidak signifikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB). Namun Gunantara,dkk (2014) menunjukkan belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kota Ternate sebagai salah satu provinsi di Indonesia juga tidak terlepas dari masalah ketimpangan distribusi pendapatan seperti apa yang dialami daerah lainnya. Kota Ternate tentu saja memiliki berbagai persoalan yang harus diselesaikan, diantaranya adalah masalah pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan distribusi pendapatan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Ternate memberikan gambaran kinerja pembangunan ekonomi dari waktu ke waktu, sehingga arah perekonomian daerah akan lebih jelas. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan digunakan untuk memaju laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun.

Selanjutnya ini dapat dilihat dibawah ini Realisasi Pengeluaran Daerah Di Kota Ternate Atas Dasar Harga Konstan menurut Pengeluaran 2010 - 2020 (%)

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Pengeluaran Daerah Di Kota Ternate 2010-2020**  
**(Miliar Rupiah)**

Tahun	Jumlah	Presntase
2010	448.172.00	-
2011	552.129.00	2,31
2012	583.773.00	5,73
2013	664.511.00	1,38
2014	730.910.00	9,99
2015	829.068.00	1,34
2016	877.571.42	5,85
2017	943.433.56	7,50
2018	898.312.61	-0,47
2019	946.608.46	5,37
2020	905.708.00	-0,43

*Sumber BPS Kota Ternate 2010-2020*

Realisasi pengeluaran pemerintah adalah realisasi atau perhitungan APBD pada tiap tahun anggaran. Pengeluaran Pemerintah merupakan salah satu aspek penggunaan sumber daya ekonomi yang secara langsung dikuasai dan dimiliki oleh Pemerintah dan secara tak langsung dimiliki oleh masyarakat melalui pembayaran pajak. Dilihat pada tahun 2019 realisasi pengeluaran pemerintah Kota Ternate sebesar 946.608.46. Pelaksanaan program-program dan kebijakan pemerintah tidak terlepas dari ketersediaan dana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

**Tabel 1.2**  
**Realisasi Pengeluaran Daerah Sektor Kesehatan Menurut**  
**Fungsi Daerah Kota Ternate 2011-2020 (Juta Rupiah)**

Tahun	Jumlah	Presentase
2011	26.433.899	-
2012	29.910.904	1,31
2013	35.012.309	1,70
2014	41.840.239	1,95
2015	50.067.761	1,96
2016	59.216.766	1,82
2017	71.087.402	2,04
2018	15.145.180	-0,78
2019	75.724.450	3,99
2020	73.048.000	-0,35

*Sumber BPS Kota Ternate 2011-2020*

**Tabel 1.3**  
**Realisasi Pengeluaran Daerah Sektor Pendidikan Menurut**  
**Fungsi Daerah Kota Ternate 2011-2020 (Juta Rupiah)**

Tahun	Jumlah	Presentase
2011	189.935.508	-
2012	221.081.746	1,63
2013	223.719.718	1,19
2014	259.673.739	1,60
2015	289.494.497	1,13
2016	281.844.749	-0,26
2017	245.120.328	0,13
2018	331.479.950	3,52
2019	221.380.020	-0,33
2020	201.199.000	-0,91

*Sumber BPS Kota Ternate 2011-2020*

Pada dasarnya pengeluaran daerah dapat dirinci menurut fungsi misalnya kesehatan dan pendidikan. Dilihat dari tabel diatas pengeluaran daerah pada kesehatan tahun 2020 sebesar 73.048.000. dan terendah pada tahun 2011 dengan jumlah 26.433.899. Kemudian pada pada pengeluaran daerah menurut

fungsi pendidikan pada tahun 2018 dengan jumlah 331.479.950 dan pada 2011 menurun dengan jumlah 189.935.508.

**Tabel 1.4**  
**Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kota Ternate 2012-2020 (Miliar Rupiah)**

Tahun	Belanja Modal	Presentase
2011	101.857.000.	-
2012	113.826.000.	1,18
2013	102.619.000.	-0,98
2014	135.774.000.	3,23
2015	162.212.000.	1,94
2016	150.235.000.	-0,73
2017	191.113.000.	2,72
2018	219.638.000.	1,49
2019	237.995.000.	8,35
2020	250.990.000.	5,46

*Sumber BPS Kota Ternate 2011-2020*

Anggaran belanja daerah Pemerintah Kota Ternate pada tahun 2020 merupakan anggaran yg di keluarkan oleh pemerintah paling besar yaitu 250.990.000 dan paling rendah pada tahun 2011 adalah 101.857.000 miliar. Realisasi pengeluaran belanja merupakan belanja langsung yang terdiri dari belanja modal

Dari paparan di atas penulis merasa tertarik untuk mengkaji sejauh mana Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pendidikan, dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Ternate sepuluh tahun terakhir 2011-2020.



**Tabel 1.5**  
**Nilai dan Tingkat Pertumbuhan PDRB Di Kota Ternate Tahun**  
**2010-2020**

Tahun	Jumlah	Persentase
2010	3.540.197,80	-
2011	3.881.911,30	9,65
2012	4.232.645,00	9,04
2013	4.557.416,40	7,67
2014	4.956.479,81	8,76
2015	5.357.318,24	8,09
2016	5.785.434,40	7,99
2017	6.222.453,80	7,55
2018	6.736.306,70	8,26
2019	7.286.007,20	8,16
2020	7.223.782,10	-0,85
Rata-rata	5.028.171,81	8,25

*Sumber BPS Kota Ternate 2010-2020*

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya.

PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.. Di lihat pada tahun 2019 jumlah PDRB sebesar 7.286.007,20 dalam bentuk persen 8,16. Salah satu indikator ekonomi berdasarkan pendekatan makro ekonomi adalah nilai Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan output (barang dan jasa) dari perekonomian pada suatu wilayah yang diukur secara periodik (tahunan).

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka di peroleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan berpengaruh terhadap pertumbuhan Ekonomi di Kota Ternate?
2. Apakah Pengeluaran Pemerintah Sektor pendidikan berpengaruh terhadap pertumbuhan Ekonomi di Kota Ternate?
3. Apakah Pengeluaran Pemerintah Belanja Modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Ternate?
4. Apakah Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pendidikan, dan Belanja Modal berpengaruh terhadap pertumbuhan Ekonomi di Kota Ternate?

## **1.3. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka di peroleh tujuan penellitian sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Sektor kesehatan terhadap pertumbuhan Ekonomi di kota Ternate
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Sektor Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Ternate
3. Untuk mengetahui Pengaruh Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Ternate
4. Untuk Mengetahui Sektor Kesehatan, Sektor pendidikan, dan Belanja Modal terhadap pertumbuhan Ekonomi di Kota Ternate

#### **1.4. Manfaat penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun secara praktis bagi beberapa pihak antara lain sebagai berikut:

1. Bagi akademisi atau mahasiswa, penelitian ini nantinya dapat dijadikan bahan referensi ilmu pengetahuan ekonomi, khususnya tentang Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pendidikan, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
2. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan masukan agar lebih peduli terhadap Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pendidikan, dan Belanja Modal untuk dapat memajukan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Bagi penulis, penelitian ini memberikan suatu wawasan pengalaman yang penting untuk menambah ilmu dan pengetahuan penulis tentang Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pendidikan, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Ternate.